

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.¹

Telah banyak fakta menunjukkan bahwa maju mundur proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang professional yang ditampilkan oleh pengelolaan kelas dalam melakukan pembinaan di madrasah, khususnya gaya kepemimpinan manajemen demokratis, sebagaimana yang diharapkan didalam UU No.20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, Bab III Prinsip

¹ Bpmp Provinsi Dki Jakarta, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (<https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-dasar-dan-menengah/>, Diakses Pada 25 September 2024 Pukul 04.12 WIB)

penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : Pendidikan diselenggarakan secara Demokratis dan berkeadilan serta tidak Diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.²

Manajemen adalah sebuah konstruk teoretik. Pendidikan adalah konsep substantif, tetapi masih di tingkat generik, sedangkan Islam adalah konsep substantif di tingkat partikularistik. Dengan demikian, secara definitif manajemen pendidikan Islam adalah proses mengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam dengan menggunakan Islam (al Qur'an dan hadits) sebagai cara pandang atau perspektif. Diyakini lembaga-lembaga pendidikan tersebut memiliki ciri khusus yang membedakanya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya sehingga diperlukan model pengelolaan secara khusus pula.

Secara lebih rinci, objek kajian manajemen pendidikan Islam meliputi: (1) perangkat kegiatan apa saja yang membentuk konstruk manajemen, mulai dari *planning, organizing, actuating hingga controlling*, (2) komponen-komponen sistemik yang niscaya ada dalam fenomena pendidikan, mulai dari input, output, outcome, proses belajar, sarana dan prasarana belajar, lingkungan, guru, kurikulum, personalia pendukung, bahan ajar, masyarakat, evaluasi dan (3) fakta empirik yang diberi label (pendidikan) Islam, dengan kekhususannya, seperti nilai-nilai yang berkembang di lingkungan lembaga pendidikan Islam (ikhlas, barokah, tawadu', istiqomah, ijtihad, dan sebagainya). Memahami pendidikan sebagai upaya teleologik di mana manajemen merupakan bagian komponen yang tak terpisahkan

² Jamhari, *Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (Mbm) Dalam Pengembangan Madrasah Aliyah Swasta Di Kabupaten Lampung Timur* (Lampung: Uin Raden Intan, 2021), hal.15

dari praktik pendidikan, ilustrasi berikut dapat dipakai mencari ruang atau wilayah kajian penelitian.³

Manajemen bisnis sekolah (MBS) adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Model manajemen demikian ditujukan untuk memberikan kemandirian kepada sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Melalui MBS, setiap satuan pendidikan dapat menentukan kebijakan sendiri untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Pendekatan manajemen ini, merupakan satu sistem pengelolaan yang luas dalam berbagai aspek termasuk mutu pendidikan.

Mutu pendidikan berkaitan erat dengan derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.⁴

Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS merupakan istilah yang banyak diungkap dalam dunia pendidikan. Istilah MBS atau *School Based Management* mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai dampak dari tuntutan

³ Jumadi, *Teori Filsafat Manajemen Pendidikan Islam* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hal.44-45

⁴ Syafarudin dan Makmur Syukri, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), hal.19

masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kondisi itu, maka setiap sekolah dituntut untuk mengelola sendiri aktivitas satu- an pendidikannya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri kondisi sumberdaya yang ada di sekolahnya sehingga dapat menghasilkan outcome yang memiliki relevansi bagi kehidupan nyata.

Melalui MBS, kewenangan dalam pengelolaan sekolah, bertumpu kepada sekolah dan *stakeholder* terkait langsung. Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

MBS juga didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sekolah, layaknya setiap individu, memiliki keunikannya sendiri. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang tidak dimiliki sekolah lain. Setiap sekolah memiliki konteks dan kondisi lokal yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk optimalnya proses pendidikan di tiap sekolah, maka sekolah perlu mengelola sekolah sesuai konteks lokal tersebut.

Demikian pula dengan pengelolaan sekolah. Untuk optimalnya pengelolaan pendidikan di satu sekolah, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang unik yang disesuaikan dengan konteks lokal tersebut. Bagaimana setiap sekolah dikelola, selayaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, daya dukung lingkungan serta berbagai faktor lokal yang mewarnai. Atas dasar itulah kemudian muncul sebuah model pengelolaan sekolah dengan basis kondisi dan konteks sekolah itu sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Di Indonesia konsep ini muncul pertama kali pada tahun 2000. Secara resmi konsep ini tertuang dalam dokumen Undang-undang No. 25 tahun 2000 Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, selanjutnya tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.” Di sini jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan prinsip dalam pengelolaan satuan pendidikan. Atas dasar itu lah, maka prinsip MBS perlu disosialisasikan kepada seluruh sekolah agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.⁵

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).⁶ Berdasarkan

⁵ Agus Salim, dkk., *Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Sekolah Menengah Atas* (Jakarta Selatan: Direktorat Pembinaan SMA, 2018), hal. 2-3

⁶ *Ibid*, hal.132-133

konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen Berbasis Sekolah dalam proses Peningkatan Mutu Pendidikan yang diberikan sekolah kepada guru untuk Meneliti Bagaimana Perkembangan Sekolah dalam Menjaga Mutu Pendidikan, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih judul “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru”.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabnya melalui proses penelitian, Adapun fokus penelitian yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru?
2. Bagaimana pelaksanaan Penerapan Manajemen berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru?
3. Bagaimana evaluasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perencanaan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru
2. Mengetahui pelaksanaan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru

3. Mengetahui evaluasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah melakukan penelitian. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini bukan hanya memberikan wawasan pada teori dalam manajemen Berbasis Sekolah, akan tetapi diharapkan dapat memberikan edukasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMPN 3 Kedungwaru.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi Peneliti

Penelitian ini bukan semata menambah pengalaman peneliti; akan tetapi hal tersebut juga memberikan efek nyata dalam sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan.

- b Bagi Akademis

Penelitian ini bukan hanya menambah literatur pendidikan, rujukan pendukung; akan tetapi dengan merealisasikan penerpan manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu, maka informasi tersebut juga berguna untuk akademik serta seluruh alumni.

c Bagi Pembaca

Penelitian ini bukan semata untuk menambah wawasan bagi pembaca; akan tetapi juga berguna bagi lapisan masyarakat sebagai wadah untuk literasi mengenai penerapan manajemen madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menjadikan informasi ini sebagai motivasi bagi seluruh kalangan.

E. Penegasan Istilah

Definisi istilah penting untuk memahami titik perhatian bagi peneliti untuk menghindari kesalahpahaman apa yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti akan menjelaskan definisinya sebagai berikut:

a. Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) muncul dan menjadi populer pada saat gerakan reformasi sekolah di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Australia juga mengembangkan MBS sejalan dengan reformasi sekolah yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Sementara itu, di Indonesia, istilah MBS baru dikenal sekitar tahun 1998. Melalui bantuan *Asian Development Bank* (ADB), MBS mulai disosialisasikan dalam bentuk pelatihan dan uji coba di beberapa sekolah serta daerah yang terpilih.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari istilah *school based management* (SBM). Istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan serta perkembangan masyarakat setempat. SBM juga dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti *School Level Management*, *School Site Management*, dan *The Grass Roots Management*. Berbagai istilah tersebut mengandung makna bahwa

pembangunan pendidikan yang sukses harus dimulai dari sekolah itu sendiri, karena sekolah adalah pihak yang paling dekat dengan permasalahan nyata di lapangan.

Selain itu, MBS juga merupakan bentuk respons terhadap perkembangan demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi cerdas dari masyarakat, terutama dari pihak-pihak di tingkat akar rumput (*grass roots*), seperti guru dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan pendapat Lavine & Havighurst dalam Coppock, terdapat beberapa istilah lain yang juga digunakan untuk *School Based Management*, seperti *Shared Governance*, *Site-Based Decision Making*, dan *Intradistrict Decentralization*.⁷ Meskipun terdapat berbagai sebutan yang berbeda, semua istilah tersebut menekankan tiga komponen utama yang sama, yakni: (1) delegasi kewenangan kepada sekolah, (2) model pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making model*) yang melibatkan para pemangku kepentingan, serta (3) peran kepemimpinan yang fasilitatif di tingkat sekolah.

MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah. Otonomi ini bertujuan agar sekolah dapat mengelola sumber daya dan dana secara lebih fleksibel, sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Selain itu, sistem MBS juga menuntut sekolah untuk mandiri dalam menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas,

⁷ Coppock M.J, (2006) Mentoring At-Risk Hispanic Students in Self-Esteem, Academic Growth, and Citizenship Awareness, *Equity & Excellence in Education Journal*, 28(1), hal. 36-43. <http://dx.doi.org/10.1080/1066568950280107>

mengendalikan, serta mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber daya, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah.⁸

b. Mutu Pendidikan

Istilah mutu berasal dari dunia bisnis Industri atau perusahaan. Dipopulerkan oleh tiga orang “Guru Mutu” yakni W. Edward Deming, Yosep Juran, dan Philip Crosby sekitar tahun 1930 an. Mereka memandang bahwa masalah mutu terkait erat dengan manajemen sehingga muncullah istilah *Total Quality Management* (TQM) atau Manajemen Mutu terpadu (MMT).⁹ Namun demikian, tidak satu pun dari ketiga Guru Mutu tersebut merekomendasikan penerapan konsep mutu dalam dunia pendidikan. Penerapan mutu dalam pendidikan baru mulai berkembang pada awal tahun 1990-an, dimulai dari perguruan tinggi di Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh perguruan tinggi di Inggris. Pada awalnya, gagasan ini mendapat penolakan dari para pakar pendidikan di Inggris yang khawatir bahwa penggunaan bahasa manajemen industri dalam pendidikan dapat mengaburkan makna dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Seiring waktu, terjadi kolaborasi antara dunia pendidikan dan bisnis, yang akhirnya memungkinkan konsep-konsep industri diterima dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah istilah "mutu pendidikan." Meski demikian, dapat dipahami mengapa ketiga Guru Mutu tersebut tidak merekomendasikan penerapan konsep mutu dalam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya implikasi istilah yang dapat mendistorsi makna

⁸ Dakir dan Latifah Husein, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: K-Media, 2017), hal. 59-60

⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education 3th Edition*. (London: Routledge, 2014), hal. 97

pendidikan, seperti konsep pelanggan, kepuasan, dan kebutuhan, yang lebih sering merujuk pada nilai-nilai material semata.¹⁰

Pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam, mencakup pesan-pesan nilai yang jauh lebih bermakna. Secara filosofis, mutu merujuk pada upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh para “Guru Mutu”, mutu selalu berkaitan erat dengan manajemen. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, mutu dapat diartikan sebagai keberhasilan totalitas layanan pendidikan dalam membentuk peserta didik agar memiliki nilai-nilai yang bermakna bagi kehidupannya..¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, berisi pembahasan tentang proses pemikiran dalam penelitian pustaka yang meliputi: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika pembahasan

Bab II, kajian kepustakaan. Bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu (a) kajian teori, (b) penelitian terdahulu dan (c) kerangka berpikir. Kajian pustaka memuat tentang manajemen Berbasis Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan, kemudian penelitian terdahulu mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III, metode penelitian. Bagian terdiri dari beberapa sub bab yang berupa (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d)

¹⁰ *Ibid*, hal. 99

¹¹ Sukirman, Dkk., *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu* (Yogyakarta: Nuta Media, 2023), hal.14-15.

data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) pengecekan keabsahan data, dan (g) prosedur penelitian.

Bab IV hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari (a) deskripsi data, (b) analisis data, dan (c) temuan penelitian.

Bab V pembahasan.

Bab VI penutup yang terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran.